

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

Transformasi Pemikiran Politik Intelektual Muhammadiyah dalam Penguatan *civil society* di Indonesia

Sadikin  
Institut Teknologi dan Bisnis-Ahmad Dahlan Jakarta  
Sadikin@upi.edu

---

**Abstrak**

Jurnal ini memfokuskan kajiannya pada masalah pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Permasalahan yang dijawab dalam jurnal ini mencakup pemikiran politik kebangsaan intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Dengan demikian, untuk menjawab persoalan tersebut, jurnal ini menggunakan rancangan penelitian etnografi. Rancangan penelitian kualitatif ini, dapat dapat mengidentifikasi sekelompok orang; mempelajari mereka di rumah atau di tempat kerjanya; dan mengembangkan gambaran umum tentang kelompok itu. Mencatat bagaimana mereka berprilaku, berfikir dan berbicara. Dalam kerangka epistemik, kajian jurnal ini mempertimbangkan beberapa epistemik teoritis terhadap pemikiran politik kebangsaan para intelektual Muhammadiyah era reformasi dipancarkan oleh Amien Rais, Ahmad Syafii Maarif, Din Syamsudin dan Haedar Nashir.



**Pendahuluan**

Kekuatan *civil society* di era reformasi saat ini patut diragukan. Tokoh-tokoh penggerak *civil society* sejak era reformasi dirintis hingga sekarang terjebak dalam kehidupan *hard politics*, yaitu aktivitas politik praktis dalam kekuasaan formal pemerintahan melalui mekanisme pemilu atau gerakan yang bersifat kepartaian (Argenti, 2017:84). Padahal, sebagai gerakan *civil society* sepatutnya untuk memainkan peran sebagai *soft politics*, yaitu aktivitas politik dalam kerangka gerakan moral yang tidak berkepentingan merebut kekuasaan formal pemerintahan, tetapi hanya mempengaruhi kekuasaan dari luar struktur pemerintahan.

Banyak faktor yang menyebabkan melemahnya *civil society* dan terpolarisasinya gerakan reformasi di Indonesia. Gerakan *civil society* Indonesia di era reformasi lebih menunjukkan kelemahannya daripada kekuatannya. *Civil society* yang semula otonom terkooptasi kepada negara. Intelektual *civil society* sendiri justru memperlihatkan sikap inkonsistensi antara nilai dan aksi. Lebih jauh, *civil society* telah menjadi sarana *struggle for*

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

*power* dan ketika *power* diraih terjadi kooptasi *civil society* terhadap negara. Dalam lingkup yang lebih luas, telah terjadi hilangnya keadaban publik dan munculnya primordialisme baru, seperti nasionalisme etnis, komunalisme, dan sektarianisme agama.

Dalam konteks reformasi, ketika bangsa Indonesia dihadapkan dengan pelbagai bentuk dekadensi moral, kesenjangan sosio-politik dan ekonomi dalam ruang publik terutama yang berkenaan dengan ketidakadilan, korupsi, kekerasan, kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah, sangat berpengaruh dalam membangun keseimbangan yang baru bagi terbentuknya proses gerakan reformasi dan penguatan *civil society*. Muhammadiyah melalui peran tokoh intelektualnya bersama dengan kekuatan lain yang termasuk bagian dari kekuatan reformasi ikut bertanggung jawab dalam mengawal jalannya reformasi secara sistematis agar tidak bermuara pada *cheos* politik.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik di tengah melemahnya kekuatan *civil society* era reformasi, memberikan arah bagi perjalanan politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang berkeadaban. Perjalanan politik kebangsaan Muhammadiyah ditandai dengan politik alokasi yaitu politik untuk mendistribusikan nilai luhur moral ke dalam proses politik sebagai bagian dari dakwa *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni usaha untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar dan meninggalkan kemungkaran (Nashir, 2006:125-130).

Muhammadiyah mengambil posisi dan peran sebagai *the power of politik* atau *moral forces*, yang memainkan peran sebagai *interest groups* atau sebagai *pressure groups* yang lebih efektif dalam melakukan transformasi pemikiran politik dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Dalam memainkan peran sebagai *interest groups*, Muhammadiyah berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintahan dengan memainkan fungsi sebagai *pressure groups* yaitu dengan memberikan kontrol politik, memainkan *publik opinion*, mempengaruhi pengambilan kebijakan politik, memberikan budaya politik, melakukan *lobby* membangun komunikasi dan hubungan personal, menyampaikan protes dan demonstrasi.

Dengan demikian, agenda strategis Muhammadiyah dalam melakukan transformasi pemikiran politik untuk memperkuat *civil society* di Indonesia antara lain: *Pertama*, Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan yang memainkan peran dan fungsi sebagai kelompok kepentingan yang non politik-praktis seperti transformasi kelas menengah,

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

penguatan integrasi sosial kewarganegaraan dan peningkatan kualitas hidup warga negara. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekuatan politik masyarakat yang memberikan sumbangan berharga bagi terbentuknya sistem demokrasi dan pencerahan politik nasional. *Kedua*, menyusun agenda politik. Bagi Muhammadiyah, keterlibatan dalam agenda pendidikan politik merupakan agenda yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan memperkuat posisi *civil society* seperti mewujudkan Indonesia berkemajuan melalui pemberdayaan *civil society*, membela kedaulatan negara dan pembengan nilai-nilai keadaban untuk Indonesia berkemajuan. yang merupakan cita-cita Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat madani.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan narasi penelitian. Penggunaan pendekatan kualitatif disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, yaitu dengan harapan dapat memahami masalah-masalah kemanusiaan yang berkenaan dengan pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi dan memahami anatomi dari pemikiran politik intelektual Muhammadiyah secara holistik. Bagi Creswell (2015:31) penggunaan kualitatif dalam metodologi penelitian itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang oleh peneliti tidak mengetahui variabel-variabelnya dan perlu mengeksplorasinya.

Penelitian ini menggunakan rancangan etnografi. Dengan menggunakan rancangan kualitatif ini, para peneliti dapat mengidentifikasi sekelompok orang; mempelajari mereka di rumah atau ditempat kerjanya; dan mengembangkan gambaran umum tentang kelompok itu. mencatat bagaimana mereka berperilaku, berpikir dan berbicara. Alasan menggunakan metode ini, sebagai berikut: *Pertama*, dengan rancangan penelitian etnografis ini, peneliti dapat mengidentifikasi hakekat pemikiran politik Intelektual Muhammmadiyah, sebagai obyek dalam penelitian ini. *Kedua*, dengan metode pendekatan etnografis, peneliti dapat menggali dokumen-dokumen, bahasa, ritual, struktur, ekonomi, politik, tahap kehidupan, interaksi dan gaya komunikasi.

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

Misalnya berupa surat-surat keputusan dan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sejak pasca reformasi 1998-2015. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Creswell (2015:932) rancangan etnografis adalah prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan pola-pola perilaku, keyakinan dan bahasa yang sama pada *culture sharing group* (kelompok berbudaya sama), yang berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, pada proses pelaksanaan penelitian etnografi yang menjadi fokus adalah pemikiran politik intelektual Muhammadiyah sepanjang era reformasi dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggali nilai-nilai yang bersumber dari aktifitas kesehariaanya. Dengan demikian, penelitian etnografi melibatkan seluruh aktifitas intelektual Muhammadiyah, yang meliputi berbicara, berfikir dan bertindak dalam merespon realitas global kemanusiaan.

Penggunakan metode etnografis dalam penelitian ini, didasari dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, sesuai dengan permasalahan yang dikaji yakni bagaimana transformasi pemikiran politik Intelektual Muhammadiyah dalam memperkuat posisi *civil society* di Indonesia. Maka intelektual Muhammadiyah sebagai suatu kajian etnografi, di mana pemikiran politik, dapat dipelajari secara ilmiah. Sebagai suatu etnografi, Muhammadiyah menurut Mujahid (2013:9) adalah suatu organisasi modernis. Karena kesedian Muhammadiyah untuk mengadopsi metode-metode modern (barat) dalam kehidupan organisasi sehari-hari, misalnya dalam sistem pendidikan, Muhammadiyah mengambil alih sistem pendidikan barat.

*Kedua*, metode etnografis digunakan dalam penelitian ini dikarenakan Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi dan gerakan reformasi. sebagai suatu fenomena maka peneliti berusaha mengeksplorasi dan berusaha memahami makna yang terkandung dari aktivitas dan pemikiran politik yang ditransformasikan. Usaha untuk memahami makna tersebut di dasarkan bahwa etnografi didefinisikan sebagai data dari pengalaman yang dapat diamati dan dapat dipelajari. Etnografi menghasilkan pandangan partisipan melalui kutipan yang diedit dengan cermat dan memiliki kata final tentang interpretasi dan presentasi budaya (Creswell, 2015:937). Dengan metode etnografi, peneliti dapat melaporkan data objektif dengan gaya terukur yang tidak dicemari oleh bias, tujuan politik, *judgment* pribadi.

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

Partisipan penelitian etnografis ini adalah intelektual perserikatan Muhammadiyah, yang terlibat dalam persolan *civil society* yang diwacanakan, seperti pluralisme, politik, penegakan keadilan, demokrasi, pembelaan terhadap kaum *dhu'afa* dan *mustadh'afin*, pengakuan atas pluralitas atau kemajemukan bangsa, toleransi dan lain sebagainya. Narasumber dipilih berdasarkan tingkat keakraban mereka dalam keterlibatan program kemasyarakatan, khususnya dalam penguatan *civil society*. Semua narasumber utama dipilih berdasarkan aktifitas dan keterlibatan mereka dalam sebuah program yang bertujuan memperkuat posisi *civil society* atau mereka yang akrab dengan isu tersebut karena memiliki peran penting dalam organisasi kemasyarakatan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran politik Muhammadiyah dalam pelayanan dan pemberdayaan *civil society* menuju Indonesia berkemajuan menjadi bukti nyata pengabdian Muhammadiyah dalam menopang tegaknya negara kesejahteraan. Kesetiaan Muhammadiyah dalam menopang negara, terutama dalam bidang sosial merupakan komitmen kebangsaan untuk menegakan nilai-nilai luhur moral Pancasila sebagai dasar negara. Bagi Muhammadiyah, Pancasila harus diwujudkan dalam setiap perilaku dan tindakan warga negara dalam merespon realitas kemanusiaan, kebangsaan dan ketatanegaraan.

Muhammadiyah memandang bahwa agenda reformasi merupakan sebuah proses tajdid, ishlah atau pembaharuan menuju Indonesia yang berkemajuan. Dengan demikian, reformasi haruslah menjadi sebuah gerakan pembaharuan yang membawa misi nilai moral, demokratis, adil, damai dan transparan. Muhammadiyah sebagai gerakan reformis mendorong perubahan kualitas reformasi untuk senantiasa dituntut untuk menggerakkan roda reformasi dalam bingkai kewarganegaraan, kemanusiaan, kebangsaan dan keindonesiaan. Tokoh Muhammadiyah, baik secara personal maupun secara impersonal membawa muatan isi dari prinsip-prinsip Khittah Perjuangan Muhammadiyah secara kelembagaan dalam merespon realitas reformasi kebangsaan. Agenda reformasi sebagai tuntutan nasional bangsa Indonesia, memiliki kesamaan visi dengan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi reformis di kalangan umat Islam turut mengembangkan sumber daya manusia secara lebih terprogram, konseptual dan sistematis menuju Indonesia yang berkemajuan. Berikut ini merupakan produk pemikiran

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

politik intelektual Muhammadiyah era reformasi, baik secara tokoh Muhammadiyah maupun pemikiran formal kelembagaan Muhammadiyah.

**a) Paradigma Pemikiran Politik Intelektual Amien Rais**

Peran Muhammadiyah, dalam menjalankan politik kebangsaan melalui Prof. Dr. M. Amien Rais telah menjadi lokomotif dalam memelopori tuntutan reformasi. Bagi Syafi'i Maarif, Amien Raislah yang sebenarnya *the real founder of reform movement* dalam menjalankan politik kebangsaan. Ijtihad politik yang dilakukan Amien Rais, pada awal reformasi tetap terukur dan tidak mengubah warna jatidiri Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi islam yang berjuang dalam bidang dakwah.

Berikut ini merupakan beberapa pandangan politik kebangsaan Amien Rais dalam menyikapi persoalan ekonomi yang mengancam stabilitas nasional meliputi: *Pertama*, tidak ada sirkulasi elit kepemimpinan sehingga tidak ada perubahan, penyegaran dan pembaharuan dalam pemikiran akibatnya adalah penyakit-penyakit sosial tumbuh menjamur. *Kedua*, krisis moral bangsa dan para pemangku kekuasaan dalam menjalankan amanah konstitusi. Akibatnya adalah ketidakadilan tumbuh menjamur. *Ketiga*, keserakahan yang sangat masif dalam menjalankan roda pemerintahan. Akibatnya adalah monopoli, kolusi dan manipulasi menjadi budaya dan kebiasaan elit dalam pemerintahan. *Kempat*, krisis ekonomi yang melanda negeri ini disebabkan oleh keconkakan dari kekuasaan yang tertinggi hingga kebawa, dari samping kanan dan menyamping. *Kelima*, keterpurukan ekonomi dikarenakan belum adanya kesadaran dari pemangku kekuasaan untuk memperbaharui dan menghentikan tingkat kerusakan.

Gagasan yang paling monumental dalam memainkan politik kebangsaan Amien Rais dalam konteks Muhammadiyah, selama masih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah adalah gagasan tentang *higt politics*, yang bersumber dari hasil analisis perilaku politik yang berkembang. Kehadiran Amien Rais dalam Muhammadiyah menjadi lebih progresif dalam dunia politik setelah sekian lama berada di zona aman pasca pembubaran partai Masyumi. Gagasan tentang *higt politics* yang dilontarkan Amien Rais diartikan sebagai sebuah perilaku politik adiluhung yang berpijak pada nilai-nilai luhur moral kemuhammadiyaan, keislaman dan keindonesiaan. Ia menyebutkan tiga ciri perilaku *higt politics*, yaitu: *Pertama*, perilaku politik sebagai amanah dan sebagai konsep keagamaan. *Kedua*, kesadaran akan tanggung

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

jawab politik. *Ketiga*, keterkaitan politik dengan prinsip persaudaraan yang melampaui batas kecardilan agama, etnis, ras dan status sosial- ekonomi-budaya.

Anatomi *high politics* dalam alam pemikiran Amien Rais adalah model konstruksi budaya politik Muhammadiyah, yang diartikan sebagai politik kualitas tinggi yang berpijak pada nilai-nilai luhur, adiluhung dan berdimensi moral serta etis. *High politics* menjadi ciri khas budaya politik kelembagaan Muhammadiyah secara institusi yang berpijak pada etika keagamaan islam. Bagi Amien Rais, etika keagamaan yang menjadi logosentrisme *high politics* adalah tauhid sosial. Dengan demikian, pokok dari komitmen tauhid sosial adalah kewarganegaraan demokrasi, pengakuan atas pluralitas, toleransi, penegakan keadilan, pembelaan terhadap kaum *dhu'afa* dan *mustadh'afin* dan kemajemukan bangsa.

**b) Paradigma Pemikiran Politik Intelektual Ahmad Syafi'i Maarif**

Syafi'i Maarif, tampil sebagai tokoh intelektual yang membawa Muhammadiyah pada konsep kultural. Buya Syafii Maarif, memainkan peran intelektualnya untuk memperdayakan umat dan warga negara dalam mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Pada awal reformasi, Buya Syafii Maarif turut menyuarakan agar UUD 1945 harus segerah diamandemenkan demi terciptanya *good governance* yang demokratis. Gagasan pemikiran ini mengandung pesan politik kebangsaan yang adiluhung bagi pertumbuhan demokrasi pasca reformasi.

Sebagai seorang tokoh pluralisme dan humanisme, Syafii Maarif dengan kapasistasnya sebagai Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah turut aktif dalam mendinginkan suasana konflik sosial, ekonomi dan politik di beberapa titik wilayah di Indonesia yang meliputi Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Muhammadiyah memainkan peran yang sangat besar dalam resolusi konflik dengan menjadikan dirinya sebagai elemen *civil society* dalam upaya menhangatkan suasana konflik tersebut dengan mengambil langkah-langkah politik kebangsaan.

Sejak kepemimpinan Buya Syafii Maarif, Muhammadiyah dengan gigihnya memperjuangkan syiar islam yang damai, moderat, hingga dapat diterima banyak pihak. Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Buya Syafii Maarif juga terus memperjuangkan dan meyarakan tentang pluralisme, toleransi dan kekuatan masyarakat dalam

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

mengembangkan nilai-nilai demokrasi menuju Indonesia yang berkemajuan. Peran Muhammadiyah selama masa kepemimpinan Buya Syafii Maarif dalam meletakkan dasar nilai-nilai demokrasi pada masa transisi reformasi semakin kuat dan berkontribusi besar bagi terselenggaranya kehidupan warga negara yang demokratis. Sebagai pilar utama dalam masyarakat demokratis, Muhammadiyah telah membimbing dan mendukung pelaksanaan kegiatan demokrasi kepada ortom-ortomnya dalam memperkuat *civil society* di Indonesia.

**c) Paradigma Pemikiran Politik Intelektual Din Syamsuddin**

Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, Muhammadiyah terus mengembangkan sayapnya hingga dunia internasional. Kepribadian Din Syamsuddin, yang cakap pergaulannya lintas negara dan peradaban sehingga menampilkan syi'ar Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang diperhitungkan dunia internasional. Sejak Din Syamsuddin menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, topik tentang Internasionalisasi Muhammadiyah, menjadi bahan diskursus organisasi yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan ini. Kiprah dan kontestasi Muhammadiyah di dunia internasional ditandai dengan konsolidasi dan partisipasi Muhammadiyah di berbagai organisasi dunia internasional, seperti pertemuan agama tingkat dunia, berbicara tentang Islam Indonesia di forum internasional dan aksi kemanusiaan di berbagai negara dunia.

Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah turut membina kerukunan antar umat beragama dan merajut aliansi antar peradaban baik tingkat nasional maupun dunia internasional. Din Syamsuddin telah menorehkan jejak warisan yang sangat penting menyuarakan urgensi hubungan perdamaian antar umat beragama melalui berbagai forum dunia internasional. Bahkan ikut mendirikan lembaga masyarakat sipil internasional pada tahun 2007 dan turut dalam inisiasi Aliansi Internasional Penggiat Pengasuhan Anak dengan mengarusutamakan keluarga *For Every Child*, dan menjadi anggota tetap yang berbasis di Inggris. Misi utama organisasi ini adalah mencegah orang tua dan anaknya agar tidak terpisah dalam satu keluarga, karena keluarga merupakan tempat yang terbaik bagi anak dalam menumbuhkan bakat hidupnya. Gerakan ini juga sudah membuka cabang di Indonesia dengan nama Aliansi Pengasuhan Berbasis Keluarga, yang dianggotai oleh ormas-ormas dan LSM nasional yang bergerak dalam bidang pengasuhan dan perlindungan anak.



**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

Dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Din Syamsuddin, Muhammadiyah membentuk tiga lembaga *filantropi* untuk menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan demokrasi dalam merespon realitas kemanusiaan. Ketiga lembaga *filantropi* itu adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Kelahiran tiga lembaga tersebut sebagai bentuk intenalisasi nilai-nilai kewarganegaraan demokrasi untuk mendorong pembangunan manusia, keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

**d) Paradigma Pemikiran Politik Intelektual Haedar Nashir**

Menurut Prof. Munir Mulka, saat ini Ketua Umum PP Muhammadiyah mencoba merangkum dokumen-dokumen lama yang seperti peran politik kebangsaan Muhammadiyah tanpa harus menjadi partai politik atau berafiliasi dengan pasangan calon presiden tertentu. Salah satu dokumen lama yang dihidupkan kembali oleh Haedar Nasir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah adalah pemikiran pokok Muhammadiyah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *Darul Ahdi Wasy-Syahada*, yaitu tempat persaksian, tempat pembuktian rumah bagi seluruh warga negara dan tempat untuk berkhidmat dan membuktikan diri bahwa negara pancasila dan ajaran islam, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-citanya sebagai negara bersatu, mandiri, berdaulat, adil dan makmur. Menindaklanjuti keputusan Mukhtamar ke-47 tahun 2015 tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkerja sama dengan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Nota Kesepakatan Bersama pada tanggal 25 November 2017. Kerja sama itu merupakan sebuah upaya untuk membumikan nilai-nilai luhur moral pancasila sebagai *working ideology* untuk dijadikan dasar hidup kebangsaan dan ideologi negara final.

Pokok pemikiran Muhammadiyah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *Darul Ahdi Wasy-Syahada* adalah sebuah pengakuan secara sadar dan tanggung jawab moral kebangsaan bukan karena kalkulasi politik kekuasaan. Bagi Haedar, Pancaasila harus menjadi dasar negara yang dapat ditransformasikan dalam kehidupan bernegara. Dan pancasila jangan hanya disakti-saktikan, namun juga harus dapat menjadi landasan nilai dalam mengimplementasikan kehidupan bernegara baik bagi pejabat negara maupun masyarakat secara luas. Dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai luhur moral pancasila,

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

Muhammadiyah memerankan politik kebangsaan yang bermartabat. Sedangkan perjuangan politik kekuasaan atau politik praktis dilakukan oleh para kadernya di partai politik. Setiap anggota kader dan elit Muhammadiyah.

Haedar Nashir memandang sistem demokrasi senafas dengan islam dan merupakan kombinasi yang paling paripurna untuk bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, Muhammadiyah mengajak seluruh elemen *civil society* agar lebih mengutamakan etika dan moralitas dalam berdemokrasi. Haedar berpandangan bahwa sudah saatnya untuk memikirkan dan mempersiapkan sistem suksesi agenda kebangsaan untuk kepemimpinan nasional dan menyukseskan kepemimpinan lokal secara demokratis secara adil, damai dan konstitusional. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk lebih serius menciptakan tata kelolaan pemerintahan yang demokratis dan transparansi melalui peningkatan pelayanan sistem kinerja, penerapan meritokrasi yang adil dan juga berupaya agar menghindari dominasi golongan tertentu dalam segala lini kehidupan pemerintah guna menjaga dan merawat sistem demokrasi yang konstitusional.

**D. KESIMPULAN**

Peran Muhammadiyah pasca reformasi sejak kepemimpinan M. Amien Rais, Ahmad Syafi'i Maarif dan Din Syamsuddin hingga Haedar Nashir sangat signifikan bagi terbentuknya pranata demokrasi dalam masa transisi di Indonesia. Di era reformasi semiotika pemikiran politik intelektual Muhammadiyah ditandai dengan gagasan peran politik kebangsaan Amien Rais, Syafii Maarif dan Din Syamsuddin yang banyak berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik Amien Rais bisa menjadi kesadaran bagi orang untuk memperbaiki diri ke arah mana pemerintah berlabu. Syafii Maarif sebagai bapak bangsa sangat luar biasa mempromosikan kesetaraan antar kelompok, toleransi yang tinggi. Bhineka tunggal ika bagi Syafii Maarif menjadi satu cita-cita kehidupan. Din Syamsuddin sebagai utusan presiden dalam dialog lintas agama, baik internal dalam negeri maupun dunia internasional. Begitupun ikhwalnya dengan Haedar Nashir, sebagai tokoh intelektual moderat. Kepribadia yang non politik dan tidak risih menjadikan Haedar dapat diterima oleh semua golongan. Haedar Nashir adalah figur Muhammadiyah yang sangat menjunjung tinggi keadaban. Berbeda halnya dengan Amien Rais dan Din Syamsuddin yang sangat lekat dengan politik.

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

Pemikiran politik intelektual Muhammadiyah, pada dasarnya mengandung dua dimensi yang tumbuh dalam satu identitas, yakni pemikiran tokoh organisasi dan pemikiran formal organisasi sebagai produk resmi dari hasil keputusan organisasi. Pemikiran politik para tokoh Muhammadiyah, secara formal bukanlah pemikiran kolektif organisasi, namun dapat dikategorikan sebagai roh dari alam pemikiran politik Muhammadiyah, yang banyak mempengaruhi karakter dan mempengaruhi eksistensi Muhammadiyah. Sedangkan pemikiran formal organisasi merupakan sebuah produk hukum dari keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah secara kelembagaan, seperti Keputusan Mukhtamat Tarjih, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah yang semuanya merupakan representasi dari pemikiran politik Muhammadiyah secara formal yang bersifat mengikat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Argerti, Gili. 2017. *Civil Society* dan Politik Moral Muhammadiyah. Jurnal Politikom Indonesia. 2(2), pp. 82-104
- Creswell, Jhon W (2015) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mujahid Abu. 2013. *Sejarah Muhammadiyah Gerakan Tajdid di Indonesia Bagian 1*. Bandung: Toobagus Grup
- Nashir, Haedar. 2009. *Masyarakat islam yang sebenar-benarnya: Sumbangan Pemikiran*. Jakarta: *Civic Islamic Institute*